

PEMBINGKAIAN PERISTIWA CIMAREME 1919: ANALISIS PEMBERITAAN H. HASAN ARIF DALAM SURAT KABAR BELANDA

Siti Hanifah Firdaus^a, Amung Ahmad Syahir Muharam^b, Agung Purnama^c

sitihanifahfirdaus1817@gmail.com, amung_ahmad@uinsgd.ac.id, agungpurnama@uinsgd.ac.id

^{a b c} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Received: 19th July 2026

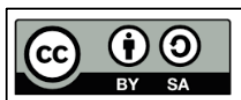
Revised: 30th July 2026

Accepted: 12th August 2026

Published: 13th August 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v7i1.413>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan tewasnya H. Hasan Arif dalam surat kabar Belanda tahun 1919 serta mengungkap strategi wacana yang digunakan oleh media kolonial dalam membingkai peristiwa tersebut. Peristiwa Cimareme tahun 1919 terjadi akibat penolakan masyarakat terhadap kebijakan wajib penjualan padi secara paksa yang memberatkan petani di tengah krisis pangan akibat dampak Perang Dunia I. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yang diperkuat dengan teori pembingkai Robert Entman, konsep orientalisme Edward Said, dan perspektif komunikasi politik Herbert Schiller. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola pembingkai yang sistematis dan seragam: surat kabar membagi pemberitaan menjadi tiga tahap, yaitu penyederhanaan masalah, pembenaran tindakan represif, dan reduksi peristiwa menjadi kasus hukum semata. Media secara konsisten melabeli H. Hasan Arif sebagai pemberontak dan fanatik agama, sekaligus menutup akses terhadap narasi pihak lain untuk membenarkan kekuasaan kolonial. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkapkan mekanisme kerja media kolonial sebagai alat hegemoni, sehingga memperkaya pemahaman sejarah mengenai bagaimana narasi perlawanan dikonstruksi untuk kepentingan penguasa.

KATA KUNCI

Pemberitaan kolonial; surat kabar Belanda; perlawanan Cimareme; H. Hasan Arif; pembingkai wacana

ABSTRACT

This study aims to analyze the reporting on the death of H. Hasan Arif in Dutch newspapers in 1919 and to reveal the discourse strategies used by colonial media to frame the event. The Cimareme incident of 1919 arose from the people's rejection of the forced rice procurement policy that heavily burdened local farmers amid the food crisis caused by World War I. This research employs the historical method consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, strengthened by Robert Entman's framing theory, Edward Said's concept of Orientalism, and Herbert Schiller's perspective on political communication. The results show a systematic and uniform framing pattern: newspapers divided the reporting into three stages, namely simplification of the issue, justification of repressive actions, and reduction of the event into a mere legal case. The media consistently labeled H. Hasan Arif as a rebel and religious fanatic, while blocking access to alternative narratives to justify colonial power. This study contributes new insights by revealing the mechanism of colonial media as a hegemonic instrument, thereby enriching historical understanding of how resistance narratives were constructed to serve ruling interests.

KEYWORDS

Colonial reporting; Dutch newspapers; Cimareme resistance; H. Hasan Arif; discourse framing

PENDAHULUAN

Kebijakan kolonial yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda sejak abad ke-19, mulai dari sistem sewa tanah, tanam paksa, hingga masa politik liberal, telah mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat desa secara drastis. Sistem yang semula berbasis ekonomi subsisten dan ikatan sosial tradisional bergeser menjadi ekonomi berbasis uang serta hubungan yang didasarkan pada kepentingan pasar dan kekuasaan birokrasi pusat¹. Tekanan yang ditimbulkan oleh kebijakan eksploitatif ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga melemahkan kewibawaan penguasa lokal dan menekan kehidupan rakyat kecil, yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah, termasuk wilayah Priangan.

Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, pengenalan sistem sewa tanah mengubah status petani menjadi penyewa tanah negara dan mewajibkan pembayaran pajak secara tunai. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menghapus praktik paksaan, sistem tersebut justru memaksa petani untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga yang ditetapkan sepihak, serta memperkenalkan sistem ekonomi uang yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Kondisi ini kemudian diperparah oleh kebijakan tanam paksa pada masa pemerintahan Van den Bosch, yang membebani tenaga kerja dan lahan pertanian secara berlebihan². Ketidakadilan ekonomi yang terus berlanjut ini menjadi akar utama ketidakpuasan rakyat yang mendalam dan berlangsung hingga awal abad ke-20.

Pada awal abad ke-20, meskipun pemerintah kolonial telah menerapkan Politik Etis yang menjanjikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan rakyat, praktik di lapangan justru menunjukkan bahwa komersialisasi tanah dan sistem ekonomi uang semakin menekan petani kecil. Tanah yang semula menjadi sumber kehidupan bersama berubah menjadi komoditas bernilai tinggi, sehingga banyak petani kehilangan hak atas lahan mereka dan terpaksa menjadi buruh tani di tanah yang dulunya mereka miliki. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar ini memicu munculnya perlawanan dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki otoritas moral dan kepercayaan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, sekaligus melindungi hak-hak warga yang terpinggirkan³.

Salah satu peristiwa perlawanan yang bermula dari ketidakadilan ekonomi tersebut adalah peristiwa Cimareme di Garut pada tahun 1919 yang dipimpin oleh H. Hasan Arif. Peristiwa ini tidak hanya penting dilihat dari sisi perlawanan fisiknya, melainkan juga dari bagaimana peristiwa tersebut

¹ Yuliati, "Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa", Sejarah dan Budaya 7, no. 1 (2013): hlm. 96.

² Yuliati, "Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa", *ibid*... hlm. 98.

³ Sari A. Handayani, "Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900-1942", Lembaran Sejarah 13, no. 2 (2017): hlm. 228

dipahami dan disebarkan informasinya melalui media massa yang saat itu dikuasai sepenuhnya oleh pihak kolonial. Surat kabar berbahasa Belanda pada masa itu memegang peranan sangat vital dalam membentuk pandangan dunia masyarakat, baik di Hindia Belanda maupun di Negeri Belanda. Media ini tidak sekadar menyampaikan berita, melainkan berfungsi sebagai instrumen ideologis yang berperan membentuk opini publik agar selaras dengan kepentingan penguasa⁴. Kajian mengenai peristiwa Cimarame dan sosok H. Hasan Arif sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sejarawan maupun peneliti. Kutoyo misalnya, dalam karyanya secara mendalam menguraikan riwayat hidup, pemikiran, serta perjuangan H. Hasan Arif menolak segala bentuk penindasan penjajah⁵. Sementara itu, Hayati lebih menekankan pada kronologi peristiwa dan bagaimana kebijakan pembelian padi paksa menjadi pemicu utama terjadinya perlawanan tersebut⁶. Demikian pula Permana yang memaparkan detail jalannya peristiwa pertempuran hingga gugurnya tokoh tersebut beserta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar⁷. Dalam skala yang lebih luas, Nafi dan Badrun meneliti aspek perlawanan ulama dan petani terhadap kebijakan kolonial, sementara Nuraidah memasukkan peristiwa ini dalam konteks pergerakan yang lebih besar di wilayah Garut pada masa itu⁸. Dalam skala yang lebih luas, Nafi dan Badrun meneliti aspek perlawanan ulama dan petani terhadap kebijakan kolonial, sementara Nuraidah memasukkan peristiwa ini dalam konteks pergerakan yang lebih besar di wilayah Garut pada masa itu.

Keterbatasan mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu adalah belum adanya kajian yang menempatkan surat kabar Belanda sebagai objek analisis utama untuk melihat konstruksi narasi yang dibangun penguasa. Kebanyakan penelitian memandang surat kabar hanya sebagai sumber pendukung fakta, bukan sebagai teks yang memiliki kepentingan dan keberpihakan tertentu. Padahal, surat kabar kolonial memiliki mekanisme seleksi informasi yang ketat untuk mempertahankan citra baik pemerintah dan melemahkan pihak yang menentang⁹. Sampai saat ini, kajian terdahulu mengenai peristiwa Cimarame banyak menyoroti aspek sosial-ekonomi dan

⁴ Miftahul Habib, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX", *Jurnal Istoria* 12, no. 2 (2017): hlm. 25.

⁵ Suyono Kutoyo, Haji Hasan Arif: *Riwayat Hidup dan Perjuangannya* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 16-18.

⁶ Chusnul Hayati, *Peristiwa Cimarame Tahun 1919: Perlawanan H. Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi* (Semarang: Mimbar Offset, t.th.), hlm. 15.

⁷ Aan Merdeka Permana, *Banjir Getih di Pasantren Cimarame* (Bandung: Putra Pajajaran Mandiri, 2012), hlm. 42.

⁸ Moh. Iqbal Nafi dan Badrun, "Perlawanan Ulama dan Petani terhadap Kebijakan Kenaikan Pajak oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Cimarame Garut, 1919" (Laporan Penelitian, 2025), hlm. 22; Siti Nuraidah, "Peristiwa Cimarame hingga Pemberontakan Sarekat Rakyat di Garut (1918-1926)" (Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023), hlm. 78.

⁹ Ahmat B. Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1995), hlm. 127.

kronologi peristiwa secara umum, namun belum banyak yang secara mendalam meneliti bagaimana media kolonial mempresentasikan dan membingkai peristiwa tersebut¹⁰. Pada masa itu, surat kabar Belanda tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampai informasi, melainkan juga berperan sebagai alat propaganda yang sengaja dibentuk untuk membentuk opini publik guna melegitimasi tindakan kekuasaan kolonial¹¹. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana surat kabar Belanda mengkonstruksi narasi mengenai kematian Haji Hasan Arif, serta untuk memahami bagaimana media berperan sebagai instrumen yang digunakan untuk mempertahankan hegemoni dan kekuasaan kolonial di tanah jajahan

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan berfokus pada analisis isi dan wacana pemberitaan. Penelitian ini tidak hanya berusaha merekonstruksi apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap bagaimana versi kejadian yang disebarkan oleh pihak penguasa melalui media berusaha membentuk persepsi publik. Hal ini penting karena narasi yang dibangun media masa itu menjadi dasar pemahaman sejarah yang beredar selama puluhan tahun, sehingga perlu dikaji ulang secara kritis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pers kolonial Belanda pada awal abad ke-20, Menganalisis tahapan dan pola pemberitaan peristiwa Cimoreme dalam surat kabar Belanda tahun 1919, serta Mengungkap konstruksi citra H. Hasan Arif dan strategi pembungkaman yang digunakan media kolonial untuk membenarkan tindakan kekuasaannya.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu sejarah, khususnya sejarah media dan sejarah perlawanan rakyat. Penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa peristiwa sejarah tidak hanya terjadi begitu saja, melainkan juga dikonstruksi melalui wacana. Selain itu, kajian ini menjadi bukti nyata bagaimana media dapat digunakan sebagai alat hegemoni untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga penting bagi generasi masa kini untuk senantiasa kritis terhadap setiap informasi yang diterima.

METODE

Metode ini dikombinasikan dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengungkap konstruksi makna dan kepentingan di balik teks berita. Penggabungan kedua pendekatan ini dipilih agar penelitian tidak hanya merekonstruksi fakta peristiwa secara kronologis, tetapi juga mampu

¹⁰ Moh. Iqbal Nafi dan Badrun, "*Perlawanan Ulama dan Petani terhadap Kebijakan Kenaikan Pajak oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Cimoreme Garut, 1919*" (Laporan Penelitian, 2025), hlm. 22; Siti Nuraidah, "*Peristiwa Cimoreme hingga Pemberontakan Sarekat Rakyat di Garut (1918-1926)*" (Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023), hlm. 78.

¹¹ Miftahul Habib, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX", *Jurnal Istoria* 12, no. 2 (2017): hlm. 25.

membongkar strategi wacana yang dibangun oleh pers kolonial untuk memengaruhi persepsi publik.¹² Metode ini dikombinasikan dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengungkap konstruksi makna dan kepentingan di balik teks berita. Penggabungan kedua pendekatan ini dipilih agar penelitian tidak hanya merekonstruksi fakta peristiwa secara kronologis, tetapi juga mampu membongkar strategi wacana yang dibangun oleh pers kolonial untuk memengaruhi persepsi publik.

1. Heuristik, Tahap ini merupakan proses pengumpulan sumber sejarah yang relevan dan terpercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran arsip digital resmi seperti Delpher Digital Library, serta koleksi fisik dan digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas, dan arsip lembaga kesejarahan lainnya. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama:

Sumber Primer: Sebanyak 15 surat kabar berbahasa Belanda yang terbit pada rentang waktu 8 Juli hingga 27 November 1919. Kelima belas surat kabar tersebut meliputi: *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Preanger-bode*, *De Locomotief*, *Algemeen Handelsblad*, *De Telegraaf*, *De Courant*, *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, *Het Vaderland*, *De Sumatra Post*, *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *De Java-bode*, *Soerabaijasch Handelsblad*, *De Nieuwe Courant*, *Het Handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, dan *De Amsterdamsche Courant*. Pemilihan 15 surat kabar ini didasarkan pada pertimbangan bahwa media tersebut mewakili wilayah terbit yang luas, mulai dari Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, hingga kota-kota utama di Negeri Belanda, sehingga dapat menggambarkan penyebaran dan keseragaman narasi secara menyeluruh. Kriteria Inklusi: Surat kabar yang memuat laporan berita, perkembangan situasi, pernyataan resmi, atau analisis yang berkaitan langsung dengan peristiwa Cimarame, H. Hasan Arif, maupun kebijakan pangan terkait. Kriteria Eksklusif: Dokumen yang tidak memiliki tanggal terbit jelas, edisi yang rusak/tidak lengkap, serta tulisan yang hanya menyebutkan nama tempat atau tokoh tanpa keterkaitan substansial dengan peristiwa yang dikaji.

Sumber Sekunder: Berupa buku monografi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas mengenai peristiwa Cimarame, perlawanan rakyat, dinamika pers kolonial, kebijakan ekonomi Hindia Belanda, serta teori-teori yang relevan dengan analisis wacana dan komunikasi politik.

2. Kritik Sumber, Evaluasi sumber dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keandalan data yang digunakan, yang dibagi menjadi dua tahap:

¹² Anton Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 81; Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 73.

Kritik Eksternal: Memeriksa aspek fisik dokumen, meliputi keaslian edisi surat kabar, tanggal terbit, nama penerbit, kelengkapan halaman, dan asal-usul arsip. Seluruh 15 surat kabar yang digunakan merupakan dokumen asli yang telah didigitalisasikan secara resmi oleh lembaga arsip terpercaya, sehingga validitas fisiknya dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik Internal: Menilai kredibilitas isi berita, latar belakang kepemilikan dan keberpihakan penerbit, serta konteks situasi saat berita ditulis. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa pemberitaan pada umumnya bersumber dari laporan resmi pemerintah kolonial, mengandung bias ideologis yang kuat, dan membatasi akses narasi dari pihak yang berlawanan kepentingan.

3. Interpretasi, Pada tahap ini dilakukan penafsiran dan analisis mendalam terhadap isi sumber dengan mengacu pada kerangka teori yang telah ditetapkan, yaitu:

Teori Pembingkai (Framing) Robert Entman: Untuk mengidentifikasi bagaimana media menetapkan definisi masalah, menentukan penyebab peristiwa, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi yang selaras dengan kepentingan penguasa¹³.

Konsep Orientalisme Edward Said: Untuk mengkaji bagaimana pemberitaan merepresentasikan masyarakat pribumi sebagai kelompok yang irasional dan emosional, sementara pihak kolonial diposisikan sebagai pihak yang rasional, beradab, dan penjaga ketertiban¹⁴.

Perspektif Komunikasi Politik Herbert Schiller: Untuk menganalisis fungsi media sebagai instrumen hegemoni yang menyebarkan narasi kekuasaan guna melegitimasi tindakan represif dan mempertahankan dominasi kolonial¹⁵.

4. Historiografi, Tahap terakhir adalah penyusunan hasil analisis menjadi naskah karya ilmiah yang sistematis, logis, dan objektif. Penulisan disajikan secara kronologis dan tematik, dimulai dari konteks historis peristiwa, karakteristik pers kolonial, dinamika pola pemberitaan, hingga makna wacana yang terkandung di dalamnya. Hasil akhir disajikan sebagai kajian yang memperjelas peran media kolonial dalam mengendalikan persepsi publik serta merekonstruksi pemahaman yang lebih kritis mengenai perlawanan yang dipimpin oleh H. Hasan Arif.

¹³ Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): hlm. 52.

¹⁴ Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 7.

¹⁵ Herbert I. Schiller, *Culture, Inc.: The Corporate Takeover of Public Expression* (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm. 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Peristiwa Cimoreme dan Karakteristik Pers Kolonial Belanda

Perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat pedesaan di Hindia Belanda telah berlangsung sejak masa kekuasaan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles, diperkuat melalui sistem Tanam Paksa, hingga mencapai puncaknya pada masa Politik Liberal dan Politik Etis. Pergeseran kebijakan ekonomi pasca tahun 1870 melalui Undang-Undang Agraria memberikan peluang sangat luas bagi perusahaan swasta dan pemodal asing untuk menguasai lahan-lahan pertanian yang subur melalui sistem sewa jangka panjang yang menguntungkan pihak pengusaha namun merugikan petani¹⁶. Fenomena ini sejalan dengan latar belakang perlawanan yang dipimpin oleh H. Hasan Arif di Cimoreme, yang secara tegas menolak kebijakan wajib penjualan padi secara paksa yang dinilai sangat memberatkan petani kecil. Akibatnya, lahan garapan rakyat semakin menyempit, sementara jumlah penduduk terus bertambah pesat tanpa diimbangi ketersediaan tanah yang layak. Kondisi ini menciptakan kemiskinan struktural yang mendalam dan sulit teratasi di wilayah pedesaan, termasuk di Priangan¹⁷. Meskipun di kemudian hari sistem ini digantikan oleh pola eksploitasi terhadap rakyat tidak berubah sama sekali; petani tetap dipaksa menyerahkan hasil bumi terbaik dengan imbalan yang sangat kecil, sementara pengawasan pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada kepala desa yang posisinya kini berubah menjadi sekadar perpanjangan tangan kekuasaan kolonial¹⁸.

Walaupun kemudian digantikan oleh sistem Tanam Paksa, pola eksploitasi tidak berubah; petani tetap dipaksa menyerahkan hasil bumi terbaik dengan imbalan yang sangat minim, sementara kepala desa diubah fungsinya menjadi perpanjangan tangan birokrasi kolonial yang bertugas memastikan kebijakan berjalan tanpa memedulikan nasib warga¹⁹.

H. Hasan Arif tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang sejak awal menanamkan nilai-nilai kemandirian, keberanian menegakkan keadilan, dan sikap tegas menolak kerja sama dengan kekuasaan yang menindas. Di bawah kepemimpinannya, Pesantren Cimoreme tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, melainkan juga bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan sosial, tempat berkumpulnya warga untuk menyuarakan aspirasi, serta basis perlawanan terhadap ketidakadilan yang

¹⁶ Yuliati, *"Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa"*, hlm. 99.

¹⁷ Sari A. Handayani, *"Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900-1942"*, *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (2017): hlm. 230.

¹⁸ Ahmadin, *"Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial"*, *Jurnal Sejarah* 5, no. 1 (2018): hlm. 62.

¹⁹ Kutoyo, *Haji Hasan Arif*, hlm. 22-23; Permana, *Banjir Getih di Pasantren Cimoreme*, hlm. 45.

dilakukan oleh pemerintah kolonial²⁰. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi tatanan hidup masyarakat sebelum kedatangan Belanda, di mana tanah dianggap sebagai amanah leluhur yang dikelola bersama demi kesejahteraan seluruh warga, bukan sebagai barang dagangan semata, menjadi landasan moral yang membuat penolakan H. Hasan Arif mendapat dukungan luas dari masyarakat²¹.

Di wilayah Priangan, struktur sosial masih sangat dipengaruhi oleh sistem patron-klien, di mana pemuka masyarakat dianggap bertanggung jawab melindungi kaum yang lemah dan membelanya jika diperlakukan tidak adil. Kebijakan kolonial yang memaksa petani menjual padi dengan harga sangat murah melanggar prinsip keadilan tersebut, sehingga tokoh seperti H. Hasan Arif muncul sebagai pelindung dan pembela hak-hak rakyat²².

Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang tahun 1919, ketika dampak Perang Dunia I mengganggu jalur perdagangan dunia, menaikkan harga pangan secara drastis, dan menurunkan ketersediaan beras. Di tengah krisis kelaparan yang mengancam, pemerintah kolonial justru memberlakukan kebijakan wajib serah padi untuk memenuhi kebutuhan logistik militer dan warga Eropa, sehingga petani kehilangan cadangan makanannya sendiri²³. Perubahan besar ini menimbulkan ketidaknyamanan yang mendalam bagi masyarakat yang terbiasa dengan sistem kebersamaan dan saling bantu, sehingga menciptakan ketegangan sosial yang perlahan mulai terasa. Meskipun di kemudian hari sistem sewa tanah digantikan oleh sistem tanam paksa, pola eksploitasi terhadap rakyat tidak berubah sama sekali; petani tetap dipaksa menyerahkan hasil bumi terbaik dengan imbalan yang sangat kecil, sementara pengawasan pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada kepala desa yang posisinya kini berubah menjadi sekadar perpanjangan tangan kekuasaan kolonial yang tidak lagi mewakili kepentingan warga setempat²⁴. Penolakan H. Hasan Arif terhadap kebijakan ini akhirnya memicu tindakan represif; pasukan kolonial mengepung pesantren pada 23 Juli 1919, terjadilah pertempuran, dan H. Hasan Arif gugur bersama sejumlah pengikutnya²⁵.

Hakikat dan Fungsi Pers Kolonial Belanda dalam Membentuk Opini Publik

Perkembangan dunia pers di wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang masuknya teknologi cetak dan

²⁰ Suyono Kutoyo, *Haji Hasan Arif: Riwayat Hidup dan Perjuangannya* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 21; Aan Merdeka Permana, *Banjir Getih di Pasantren Cimareme* (Bandung: Putra Pajajaran Mandiri, 2012), hlm. 38..

²¹ Yuliati, "Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa", hlm. 96.

²² Ann Stoler, *Kelas dan Budaya dalam Kolonialisme Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 45..

²³ Chusnul Hayati, *Peristiwa Cimareme Tahun 1919: Perlawanan H. Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi* (Semarang: Mimbar Offset, t.th.), hlm. 22.

²⁴ Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, hlm. 68.

²⁵ Hayati, *Peristiwa Cimareme Tahun 1919*, hlm. 42.

semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi sebagai sarana pengetahuan dan pengambilan keputusan. Menurut catatan sejarah, aktivitas percetakan di Nusantara sebenarnya sudah dimulai sejak masa keberadaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada abad ke-17, namun pada masa itu kegiatan cetak masih terbatas dan belum terorganisir secara sistematis²⁶. Surat kabar sebagai sarana penyebaran berita secara teratur dan berkala baru benar-benar berkembang pesat mulai pertengahan abad ke-19, seiring dengan pelonggaran aturan perizinan percetakan yang sebelumnya sangat ketat, serta meningkatnya kebutuhan akan informasi untuk mendukung kegiatan perdagangan dan pengelolaan wilayah jajahan²⁷.

Pers yang beredar dapat dikelompokkan menjadi tiga, namun pers berbahasa Belanda menempati posisi paling dominan karena memiliki dukungan dana yang kuat, perlindungan hukum, serta akses langsung ke sumber informasi resmi pemerintah²⁸. Secara fungsi, pers kolonial berbahasa Belanda tidak sekadar berperan sebagai penyampai berita atau sarana iklan semata. Lebih dari itu, media ini berfungsi sebagai instrumen ideologis dan politik yang sangat krusial bagi kelangsungan kekuasaan kolonial. Melalui tulisan-tulisannya, pers ini berusaha membentuk pandangan publik, baik kalangan Eropa maupun masyarakat pribumi, bahwa kehadiran Belanda di Nusantara adalah bentuk tugas mulia untuk memajukan peradaban, membawa kemajuan, dan menegakkan ketertiban. Dengan cara ini, upaya perlawanan atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah seringkali digambarkan sebagai tanda ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau bahkan tindakan kriminal dan kejahatan yang harus ditindak tegas dan diberantas secara keras²⁹.

Lebih dari sekadar sarana penyebaran berita, pers kolonial berperan sebagai instrumen ideologis dan politik yang vital untuk mempertahankan kekuasaan. Melalui tulisannya, media ini membangun narasi bahwa kehadiran Belanda adalah misi mulia memajukan peradaban, sementara segala bentuk penolakan dianggap sebagai tindakan yang tidak tahu aturan, dipengaruhi kesalahpahaman, atau bahkan kejahatan yang harus ditindak tegas³⁰.

Isi pemberitaan umumnya disusun berdasarkan laporan dinas resmi, sehingga informasi yang disampaikan sudah diseleksi agar sesuai dengan kepentingan penguasa, dan jarang sekali memberikan ruang bagi pandangan

²⁶ Ahmat B. Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1995), hlm. 29.

²⁷ *Indonesian Consciousness (1855-1913)* (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1995), hlm. 34.

²⁸ Miftahul Habib, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX", *Jurnal Istoria* 12, no. 2 (2017): hlm. 27.

²⁹ Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 7; Habib, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional", hlm. 27.

³⁰ Edward W. Said, *Orientalism. Ibid.*, hlm. 28.

yang berbeda atau kritis³¹. Ciri khas yang paling menonjol adalah ketidaknetralannya, pemerintah selalu digambarkan bertindak sabar, mengikuti prosedur hukum, dan berusaha menjaga ketertiban umum, sementara pihak yang menentang digambarkan memulai kekerasan, dipengaruhi paham salah, atau tidak rasional. Fakta yang dapat merugikan citra pemerintah cenderung disembunyikan atau diminimalkan, sesuai dengan prinsip pembungkaman yang mengarahkan cara pandang pembaca sesuai keinginan penguasa³². Sebagai akibatnya, pers ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, melainkan juga berperan sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam membangun citra kekuasaan kolonial dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada masa itu.

Berbeda dengan pers vernakular atau pribumi yang ruang geraknya sangat terbatas, sering diawasi ketat, dapat disita sewaktu-waktu, dan sulit mendapatkan izin terbit, pers berbahasa Belanda justru memiliki kebebasan dan keistimewaan lebih karena merupakan bagian dari sistem kekuasaan³³. Hal ini terlihat nyata dalam penanganan peristiwa Cimagore, akses liputan dibatasi hanya untuk pers yang ditunjuk, tidak ada kesempatan bagi wartawan lokal untuk mewawancarai keluarga, kerabat, atau saksi mata, sehingga narasi yang sampai ke publik sepenuhnya adalah versi yang telah disiapkan pemerintah kolonial³⁴. Keseragaman isi berita yang ditemukan di seluruh 15 surat kabar yang diteliti, baik yang terbit di Hindia Belanda maupun di Negeri Belanda, semakin memperkuat dugaan adanya koordinasi dan penyatuan pesan resmi guna mengendalikan persepsi publik secara serentak³⁵.

Ragam dan Jangkauan Surat Kabar yang Memberitakan Peristiwa

Berdasarkan penelusuran mendalam terhadap arsip digital di Delpher Digital Library serta koleksi lembaga kearsipan lainnya, ditemukan sebanyak 15 surat kabar berbahasa Belanda yang memuat pemberitaan terkait peristiwa Cimagore dan sosok H. Hasan Arif pada rentang waktu 8 Juli hingga 27 November 1919. Kelima belas surat kabar tersebut meliputi: *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Preanger-bode*, *De Locomotief*, *Algemeen Handelsblad*, *De Telegraaf*, *De Courant*, *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, *Het Vaderland*, *De Sumatra Post*, *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *De Java-bode*,

³¹Setiawan & Kusuma, "Propaganda dan Perlawanan", *Jurnal Komunikasi dan Sejarah* 8, no. 1 (2026): hlm. 82.

³² Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): hlm. 54.

³³ Setiawan & Kusuma, "Propaganda dan Perlawanan", hlm. 85.

³⁴ *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 16 Juli 1919, hlm. 2; Setiawan & Kusuma, "Propaganda dan Perlawanan", hlm. 85.

³⁵ Adam, *The Vernacular Press*, hlm. 132.

Soerabaijasch Handelsblad, De Nieuwe Courant, Het Handelsblad voor Nederlandsch-Indië, dan De Amsterdamsche Courant.

Pemilihan kelima belas surat kabar ini didasarkan pada pertimbangan jangkauan wilayah terbit yang sangat luas, mencakup pusat kekuasaan kolonial di Batavia, daerah kejadian di Bandung dan sekitarnya, kota-kota besar di Jawa seperti Semarang dan Surabaya, hingga wilayah luar Jawa seperti Padang, serta kota-kota utama di Negeri Belanda seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa Cimoreme bukan sekadar insiden lokal, melainkan peristiwa yang dianggap cukup penting hingga menjadi sorotan publik di pusat pemerintahan kolonial maupun di negeri induk.

Meskipun diterbitkan di daerah yang berbeda-beda, pola narasi dan cara penyajian berita yang ditemukan menunjukkan keseragaman yang sangat mencolok. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemberitaan tersebut tidak berjalan secara independen, melainkan mengacu pada pedoman dan informasi resmi yang disebarkan oleh pemerintah kolonial guna mengarahkan persepsi publik secara serentak sesuai kepentingan kekuasaan³⁶

Berikut adalah kutipan asli beserta terjemahan inti dari seluruh surat kabar yang menjadi sumber data:

1. Bataviaasch Nieuwsblad, 8 Juli 1919

Asli: *"Er is in de omgeving van Garoet een weigering om de regeling van de staatsvoedselvoorziening na te komen, geleid door een plaatselijke geestelijke."*

Terjemahan: "Di sekitar wilayah Garut terjadi penolakan terhadap pelaksanaan peraturan pengadaan pangan negara, yang dipimpin oleh seorang tokoh agama setempat"³⁷

Bataviaasch Nieuwsblad, 8 Juli 1919



Sumber: Delpher Digital Library

³⁶ Robert M. Entman, *Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), hlm. 5.

³⁷ *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Juli 1919, hlm. 3.

2. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 16 Juli 1919

Asli: *"De autoriteiten hebben toezicht ingesteld en alleen officiële persvertegenwoordigers zijn toegelaten tot het gebied."*

Terjemahan: "Pihak berwenang telah melakukan pengawasan dan hanya perwakilan pers resmi yang diizinkan memasuki wilayah tersebut."³⁸



Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 16 Juli 1919

Sumber: Delpher Digital Library

3. De Preanger-bode, 23 Juli 1919

Asli: *"De woning van den geestelijke is omsingeld; bij de daaropvolgende schermutseling is de leider gedood."*

Terjemahan: "Tempat tinggal tokoh agama tersebut telah dikepung; dalam pertempuran yang terjadi selanjutnya, pemimpin tersebut tewas."³⁹



De Preanger-bode, 23 Juli 1919

Sumber: Delpher Digital Library

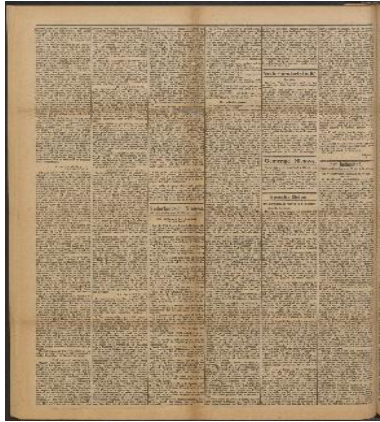
4. De Locomotief, 24 Juli 1919

Asli: *"De groep weigerde onderhandelingen en viel eerst aan, overtuigd van onkwetsbaarheid door geestelijke middelen."*

³⁸ Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 16 Juli 1919, hlm. 2.

³⁹ De Preanger-bode, 23 Juli 1919, hlm. 4.

Terjemahan: "Kelompok tersebut menolak berunding dan menyerang duluan, merasa yakin tidak bisa terluka karena perlindungan kekuatan gaib."⁴⁰



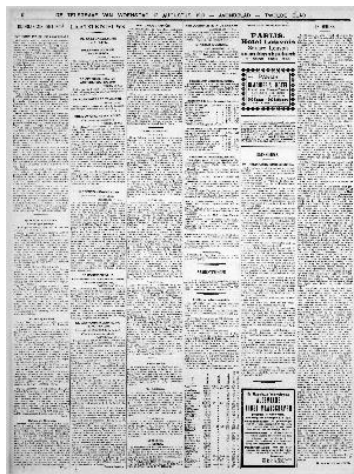
De Locomotief, 24 Juli 1919

Sumber: Delpher Digital Library

5. De Telegraaf, 13 Agustus 1919

Asli: *"Zij droegen witte kleederen, droegen sabels en geloofden vast, dat kogels hen niet konden treffen door de amuletten, die zij bij zich droegen."*

Terjemahan: "Mereka berpakaian serba putih, membawa parang, dan yakin sepenuhnya bahwa peluru tidak dapat menembus tubuh mereka karena jimat yang mereka bawa."⁴¹



De Telegraaf, 13 Agustus 1919

Sumber: Delpher Digital Library

6. Algemeen Handelsblad, 14 Agustus 1919

Asli: *"De leider was een man die de wetten des lands niet eerbiedigde en zijn aanhang opruide tegen het gezag."*

⁴⁰ De Locomotief, 24 Juli 1919, hlm. 4.

⁴¹ De Telegraaf, 13 Agustus 1919, hlm. 3.

Terjemahan: "Pemimpin itu adalah orang yang tidak menghormati hukum negara dan menghasut pengikutnya untuk melawan kekuasaan yang sah."⁴²



Algemeen Handelsblad, 14 Agustus 1919

Sumber: Delpher Digital Library

7. De Courant, 16 Agustus 1919

Asli: "*De orde is hersteld; het verzet was gebaseerd op misverstand over overheidsmaatregelen.*"

Terjemahan: "Ketertiban telah pulih; perlawanan itu didasari oleh kesalahpahaman mengenai langkah-langkah pemerintah."⁴³



De Courant, 16 Agustus 1919, halaman 2

Sumber: Delpher Digital Library

8. De Sumatra Post, 18 Agustus 1919

Asli: "*De onrust in Garoet is bezworen door krachtdadig optreden der militaire en burgerlijke autoriteiten.*"

⁴² Algemeen Handelsblad, 14 Agustus 1919, hlm. 5.

⁴³ De Courant, 16 Agustus 1919 (Amsterdam: NV Dagblad De Telegraaf & NV De Courant), hlm. 2.

Terjemahan: "Kerusuhan di Garut telah dipadamkan melalui tindakan tegas dari otoritas militer dan sipil."⁴⁴

9. Het Vaderland, 15 Oktober 1919

"De nasleep van de gebeurtenissen zal worden afgehandeld volgens de geldende rechtsregels."

Terjemahan: "Dampak lanjutan dari peristiwa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku."⁴⁵



Het Vederland, 15 Oktober 1919 halaman 2

Sumber: Delpher Digital Library

10. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 November 1919

Asli: *"De processen tegen de medeplichtigen zijn afgerond; passende straffen zijn uitgesproken."*

Terjemahan: "Sidang terhadap para pengikut yang terlibat telah selesai; hukuman yang pantas telah dijatuhkan."⁴⁶



Bataviaasch Nieuwsblad, 15 November 1919, halaman 4

Sumber: Delpher Library

⁴⁴ *De Sumatra Post*, 18 Agustus 1919 (Padang: J. De Vries & Co.), hlm. 2.

⁴⁵ Het Vaderland, 27 November 1919 (Den Haag: M. Nijhoff & C.A. van Reyn), hlm. 3.

⁴⁶ Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 November 1919 (Rotterdam: N.V. Nederlandsche Dagbladpers), hlm. 4.

11. De Java-bode, 22 Juli 1919

Asli: *"Een samenschooling onder leiding van een geestelijke werd uiteengedreven na weigering van gehoorzaamheid."*

Terjemahan: "Kerumunan yang dipimpin oleh seorang tokoh agama telah dibubarkan setelah mereka menolak untuk patuh."⁴⁷



De Locomotief, 22 Juli 1919, halaman 3

Sumber: Delpher library

12. Soerabaijasch Handelsblad, 25 Juli 1919

Asli: *"De regering heeft alles in het werk gesteld om onnodig bloedvergieten te voorkomen, maar werd daartoe gedwongen door het verzet."*

Terjemahan: "Pemerintah telah berupaya segala cara untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu, namun terpaksa bertindak karena adanya perlawanan tersebut."⁴⁸

13. De Nieuwe Courant, 1 Agustus 1919 Asli: *"De beweging was gevoed door ontevredenheid, maar liep uit op openlijke opstand tegen het gezag."*

Terjemahan: "Gerakan itu bermula dari ketidakpuasan, namun berkembang menjadi pemberontakan terang-terangan terhadap kekuasaan."⁴⁹



De Locomotief, 1 Agustus 1919, halaman 2

Sumber: Delpher Library

⁴⁷ De Java-bode, 22 Juli 1919, hlm 4

⁴⁸ Soerabaijasch Handelsblad, 25 Juli 1919

⁴⁹ De Nieuwe Courant, 1 Agustus 1919 , hlm 2

14. Het nieuws voor Nederlandsch-Indië, 19 Agustus 1919

Asli: "*De bevolking werd misleid door valse voorstellingen van zaken betreffende de leveringsplicht.*"

Terjemahan: "Masyarakat telah disesatkan oleh gambaran yang keliru mengenai kewajiban penyerahan hasil bumi tersebut."⁵⁰



Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 19 Agustus 1919

Sumber: Delpher Library

15. De Courant, 20 Agustus 1919

Asli: "*Het optreden der troepen was noodzakelijk om de veiligheid en het algemeen belang te waarborgen.*"

Terjemahan: "Tindakan pasukan sangat diperlukan demi menjamin keamanan dan kepentingan umum."⁵¹

Pola Pemberitaan dan Strategi Pembentukan Citra H. Hasan Arif

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kelima belas surat kabar yang menjadi sumber data, pola pemberitaan peristiwa Cimoreme berjalan secara bertahap dan terstruktur, yang dapat dibagi menjadi tiga fase utama:

Tahap Pertama, Awal hingga Pertengahan Juli 1919, Penyederhanaan Masalah. Pada tahap ini, berita yang dimuat masih sangat singkat dan dangkal. Bataviaasch Nieuwsblad edisi 8 Juli 1919 hanya menyebutkan adanya penolakan terhadap peraturan pengadaan pangan negara yang dipimpin seorang tokoh agama, tanpa menyinggung sedikitpun alasan ekonomi atau ketidakadilan di balik penolakan tersebut⁵². Sementara itu, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië pada 16 Juli 1919 menegaskan bahwa akses ke lokasi kejadian hanya diperbolehkan bagi perwakilan pers resmi yang ditunjuk oleh pihak berwenang⁵³. Akibatnya, publik hanya mendapatkan gambaran bahwa

⁵⁰ Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 19 Agustus 1919, hlm. 2.

⁵¹ De Courant, 20 Agustus 1919, hlm

⁵² Bataviaasch Nieuwsblad, 8 Juli 1919, hlm. 3.

⁵³ Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 16 Juli 1919, hlm. 2.

terjadi pelanggaran aturan semata, tanpa memahami akar persoalan yang sesungguhnya.

Tahap Kedua, Akhir Juli hingga Pertengahan Agustus 1919, Pembetulan Kekerasan. Setelah peristiwa pengepungan dan gugurnya H. Hasan Arif, fokus berita bergeser sepenuhnya pada bentrokan bersenjata, jumlah korban, serta keberhasilan aparat dalam memulihkan ketertiban. *De Preanger-bode* edisi 23 Juli 1919 melaporkan secara rinci bahwa lokasi Cimarame telah dikepung pasukan dan terjadi pertempuran di mana pemimpin gerakan tewas⁵⁴. Berita-berita lain seperti pada *De Locomotief* dan *De Telegraaf* menyebutkan bahwa kelompok tersebut menolak berunding, menyerang duluan, serta percaya diri kebal senjata karena pengaruh jimat dan keyakinan agama yang keliru⁵⁵. Narasi ini disusun sedemikian rupa agar tindakan represif yang dilakukan oleh pasukan kolonial terlihat sebagai langkah yang wajar, sah, dan diperlukan demi kepentingan umum serta penegakan hukum.

Media kolonial berusaha membangun citra bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat merupakan langkah yang wajar dan diperlukan. Mereka juga sengaja memanipulasi persepsi dengan menekankan aspek keagamaan dan keyakinan rakyat sebagai penyebab peristiwa, sehingga perlawanan dianggap tidak rasional dan hanya didasari oleh emosi serta kepercayaan yang salah.

Tahap Ketiga, September hingga November 1919, Reduksi Menjadi Masalah Hukum. Pada fase ini, pemberitaan tidak lagi membahas peristiwa pertempuran atau kebijakan pangan, melainkan sepenuhnya beralih ke proses hukum: penahanan pengikut yang selamat, pemeriksaan saksi, hingga putusan pengadilan. *Bataviaasch Nieuwsblad* dan surat kabar lain pada 15 November 1919 memberitakan bahwa sidang telah selesai dan para pelaku dijatuhi hukuman penjara, serta kasus dianggap telah selesai dan ketertiban telah pulih⁵⁶. Tidak ada satu pun surat kabar yang kembali meninjau ulang kebijakan yang menjadi pemicu utama, seolah perlawanan itu hanyalah pelanggaran hukum biasa, bukan respons terhadap ketidakadilan sistemik.

Penahanan pengikut yang selamat, pemeriksaan saksi, hingga pengumuman putusan sidang pengadilan. *Bataviaasch Nieuwsblad* dan *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* sama-sama memuat perkembangan terakhir pada 15 November 1919, begitu pula dengan *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Sementara itu, *Het Vaderland* yang terbit di Den Haag menyoroti dampak keamanan di wilayah Priangan pada 15 Oktober dan 27 November 1919. Pada tahap ini, tidak ada satu pun surat kabar yang kembali meninjau ulang kebijakan pengambilan padi atau kondisi kelaparan yang melatarbelakangi peristiwa, seolah masalah telah selesai sepenuhnya dengan

⁵⁴ *De Preanger-bode*, 23 Juli 1919, hlm. 4.

⁵⁵ *De Locomotief*, 24 Juli 1919, hlm. 4; *De Telegraaf*, 13 Agustus 1919, hlm. 3.

⁵⁶ *Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 November 1919, hlm. 4.

tewasnya tokoh perlawanan dan diprosesnya pengikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembingkai berita yang dikemukakan oleh Entman (1993), di mana media cenderung menutup topik yang dianggap tidak menguntungkan kekuasaan dan memindahkan perhatian ke aspek yang dapat membenarkan tindakan yang telah dilakukan.

Melalui penyajian berita ini, pemerintah kolonial berusaha menampilkan peristiwa sebagai kasus hukum yang telah diselesaikan secara tuntas. Mereka tidak menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan hukum atau kebijakan yang menjadi pemicu utama, melainkan menekankan bahwa ketertiban telah dipulihkan dan hukum telah ditegakkan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesan di mata masyarakat bahwa setiap bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah akan mendapat akibat yang tegas, sehingga dapat mencegah timbulnya perlawanan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, media kolonial berhasil mengubah peristiwa yang sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan menjadi sekadar kasus pelanggaran hukum yang telah diselesaikan.

Keseragaman pola peliputan ini memperkuat pandangan bahwa pers kolonial tidak beroperasi secara bebas dan independen. Sebagaimana dijelaskan dalam studi mengenai pers vernakular, media berbahasa Belanda cenderung berpegang erat pada laporan resmi dinas pemerintahan, sehingga jarang sekali menemukan perbedaan fakta atau sudut pandang di antara berbagai surat kabar tersebut. Hal ini membuktikan bahwa narasi yang beredar bukanlah hasil penelusuran fakta yang berimbang, melainkan hasil penyebaran pesan yang telah disiapkan untuk membentuk persepsi publik sesuai dengan kepentingan penguasa.⁵⁷

Strategi Pembingkai dan Konstruksi Citra Negatif

Melalui ketiga tahapan tersebut, surat kabar Belanda menerapkan strategi sistematis untuk membentuk citra H. Hasan Arif dan gerakannya sesuai kepentingan penguasa. Dalam pemberitaannya, surat kabar Belanda membentuk citra H. Hasan Arif yang berbeda jauh dari kenyataan sebenarnya. Mereka menggambarkan tokoh ini bukan sebagai pemimpin yang berjuang demi keadilan rakyat, melainkan sebagai pemimpin pemberontak yang memicu kerusuhan. Surat kabar juga menuduhnya memanfaatkan agama untuk memengaruhi orang lain agar melawan pemerintah. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa tindakan aparat militer dan sipil adalah langkah yang wajar dan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan negara.

⁵⁷ Adam, *The Vernacular Press*, hlm. 127.

Cara pembentukan citra tersebut dilakukan secara sistematis melalui teknik penyajian berita yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mengarahkan pandangan pembaca. Hal ini sejalan dengan teori pembingkai berita yang dikemukakan oleh Entman (1993), yang menyatakan bahwa media tidak hanya sekadar melaporkan peristiwa, tetapi juga secara aktif memilih, menekankan, dan menafsirkan fakta guna membentuk persepsi publik sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa.

Pelabelan Negatif dan Kriminalisasi: Secara konsisten digunakan istilah “pemberontak”, “gerombolan”, dan “fanatik agama” untuk mengubah makna perjuangan keadilan menjadi tindakan kriminal yang merugikan masyarakat⁵⁸. Strategi ini selaras dengan kebiasaan kolonial yang sering melabeli tokoh perlawanan sebagai penyalahguna agama agar dukungan masyarakat melemah. Contohnya, laporan yang dimuat di *Algemeen Handelsblad* tanggal 14 Agustus 1919 menyebutnya sebagai “tokoh yang tidak mematuhi hukum negara”, sedangkan *De Preanger-bode* edisi 23 Juli 1919 menulis bahwa ia “memanfaatkan pengaruh keagamaan untuk membangkitkan kemarahan warga”. Demikian pula, *De Locomotief* tanggal 24 Juli 1919 menyebut kelompoknya sebagai “gerombolan yang menentang ketertiban”. Penggunaan istilah ini sengaja dibuat agar masyarakat menganggap perlawanan tersebut bukanlah respons terhadap ketidakadilan, melainkan tindakan yang jahat dan berbahaya.

Pembentukan Citra Sebagai Ancaman: Pengikut digambarkan bersenjata lengkap, berpakaian serba putih, dan percaya pada kekuatan gaib, sehingga dianggap berbahaya dan tidak rasional. Hal ini menjadi alasan kuat bagi aparat untuk bertindak tegas dan keras demi menjaga keamanan⁵⁹.

Laporan di *De Telegraaf* tanggal 13 Agustus 1919 menyatakan, “Mereka berpakaian putih, membawa parang, dan yakin bahwa peluru tidak dapat menembus tubuh mereka karena jimat yang mereka pegang.” Gambaran ini juga diperkuat oleh *De Locomotief* yang menulis bahwa kelompok tersebut “menolak segala upaya perundingan dan justru menyerang duluan”. Dengan menonjolkan gambaran tersebut, surat kabar berusaha menciptakan kesan bahwa aparat terpaksa bertindak tegas demi melindungi keselamatan warga lain, sehingga tindakan yang menewaskan H. Hasan Arif dianggap sebagai hal yang wajar dan perlu dilakukan.

Penutupan Akses Narasi Alternatif: Sepanjang pemberitaan tidak ditemukan satu pun kutipan atau keterangan dari pihak keluarga, kerabat, atau pengikut H. Hasan Arif. Monopoli informasi ini memastikan publik hanya menerima versi yang disetujui pemerintah⁶⁰.

⁵⁸ *Algemeen Handelsblad*, 14 Agustus 1919, hlm. 5.

⁵⁹ *De Telegraaf*, 13 Agustus 1919, hlm. 3.

⁶⁰ *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 16 Juli 1919, hlm. 2.

Hal ini ditegaskan dalam laporan *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* tanggal 16 Juli 1919 yang menyatakan: “Hanya keterangan resmi dari Residen Garut dan Komandan Militer yang diakui sebagai sumber informasi yang benar.” Sebagaimana dijelaskan oleh Adam (1995), posisi pers kolonial sangat berbeda dengan pers pribumi: pers Belanda memiliki akses penuh ke informasi resmi, sementara pers lokal sering kali dibatasi atau bahkan dilarang meliput peristiwa penting⁶¹. Akibatnya, publik hanya menerima satu versi cerita yang telah disusun oleh pihak penguasa, sehingga citra yang terbentuk menjadi satu-satunya kebenaran yang diketahui masyarakat luas. Penyederhanaan Peristiwa Menjadi Masalah Hukum: Perlawanan yang bermula dari penderitaan ekonomi dan ketidakadilan struktural direduksi semata-mata menjadi pelanggaran peraturan negara yang penyelesaiannya cukup melalui jalur hukum dan hukuman pidana⁶².

Laporan di *Bataviaasch Nieuwsblad* dan *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* tanggal 15 November 1919 hanya memuat informasi mengenai jumlah tersangka, pasal yang dikenakan, dan hasil sidang. Tidak ada lagi penjelasan mengenai alasan perlawanan, seperti kebijakan pengambilan padi paksa yang tidak adil, kelangkaan pangan, atau kesulitan hidup petani saat itu. Hal ini membuat peristiwa ini tampak semata-mata sebagai kasus pelanggaran aturan biasa, bukan sebagai bentuk perlawanan yang berakar dari ketidakadilan sosial dan ekonomi⁶³.

Pola pembingkaiannya ini sepenuhnya selaras dengan kerangka teori Entman, di mana media menentukan masalah, menetapkan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi yang menguntungkan pihak berkuasa⁶⁴.

Tokoh agama sering kali menjadi poros utama dalam memobilisasi rakyat menghadapi ketidakadilan. Seperti yang terlihat dalam sejarah, pemimpin yang berlandaskan otoritas moral dan keagamaan mampu menggerakkan semangat perlawanan yang kuat dan berkelanjutan karena mereka dianggap memiliki legitimasi yang melebihi kekuasaan duniawi semata⁶⁵. Fenomena ini tercermin jelas pada peran H. Hasan Arif yang menggunakan pengaruhnya sebagai ulama untuk mengajak masyarakat menolak kebijakan yang merugikan kehidupan mereka.

Jika dilihat dari sudut pandang orientalisme Said, pemberitaan ini mencerminkan stereotip bahwa masyarakat pribumi bertindak berdasarkan emosi dan keyakinan salah, sementara pihak kolonial bertindak dengan

⁶¹ Adam, *The Vernacular Press*, hlm. 121

⁶² *Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 November 1919, hlm. 4.

⁶³ Entman, “Framing: Toward Clarification”, hlm. 53.

⁶⁴ Entman, “Framing: Toward Clarification”, hlm. 52.

⁶⁵ M. Munir, “Peran Ulama dalam Gerakan Perlawanan Rakyat di Indonesia”, *Jurnal Sejarah dan Budaya* 13, no. 1 (2019): hlm. 53.

rasionalitas dan kewibawaan⁶⁶. Lebih jauh lagi, media kolonial menjalankan fungsi hegemoni dengan melakukan “pengadilan opini” yang menjatuhkan citra buruk tanpa proses hukum yang adil dan transparan⁶⁷.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pemberitaan peristiwa Cimoreme serta sosok H. Hasan Arif dalam lima belas surat kabar berbahasa Belanda tahun 1919, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut,

Pertama, peristiwa Cimoreme tahun 1919 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari rentetan ketidakadilan struktural akibat kebijakan kolonial yang berlangsung panjang, mulai dari sistem sewa tanah, masa Tanam Paksa, hingga kebijakan ekonomi liberal dan pangan pada masa Politik Etis. Dampak Perang Dunia I yang memperparah krisis pangan, ditambah dengan pemberlakuan aturan wajib serah padi dengan harga sangat rendah, menjadi pemicu langsung munculnya perlawanan yang dipimpin oleh H. Hasan Arif sebagai bentuk pembelaan hak hidup dan martabat masyarakat petani.

Kedua, pers kolonial Belanda pada masa itu bukanlah sarana informasi yang netral dan objektif, melainkan berfungsi sebagai instrumen ideologis dan politik yang berpihak sepenuhnya pada kepentingan penguasa. Melalui mekanisme pembatasan akses liputan, penyeleksian informasi, dan penyatuan narasi resmi, kelima belas surat kabar yang diteliti menunjukkan keseragaman pola pemberitaan yang terstruktur dalam tiga tahapan, yaitu penyederhanaan masalah, membenaran tindakan represif, hingga reduksi peristiwa menjadi sekadar pelanggaran hukum semata.

Ketiga, konstruksi citra yang dibangun oleh media kolonial terhadap H. Hasan Arif dan gerakannya sangat negatif dan cenderung melakukan kriminalisasi. Melalui teori pembingkaian, orientalisme, dan hegemoni, media secara sistematis melabeli H. Hasan Arif sebagai pemberontak dan fanatik agama, menggambarkan pengikutnya sebagai kelompok irasional yang percaya kekuatan gaib, serta membenarkan tindakan kekerasan aparat kolonial sebagai langkah yang diperlukan demi menegakkan hukum dan ketertiban umum. Sebaliknya, akar masalah ketidakadilan ekonomi dan politik yang menjadi latar belakang perlawanan sengaja diabaikan atau ditutup-tutupi.

Penelitian ini menegaskan bahwa narasi sejarah yang beredar tidak lepas dari kepentingan pihak yang berkuasa saat peristiwa itu terjadi. Pemberitaan kolonial merupakan bukti nyata bagaimana media dapat digunakan secara efektif untuk membentuk opini publik, melegitimasi tindakan kekuasaan, serta

⁶⁶Said, *Orientalism*, hlm. 49.

⁶⁷ Herbert I. Schiller, *Culture, Inc.: The Corporate Takeover of Public Expression* (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm. 25.

mengendalikan persepsi terhadap kelompok yang dianggap menentang sistem. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, diperlukan sikap kritis terhadap sumber yang berasal dari pihak penguasa, serta upaya untuk mencari dan menyuarakan narasi dari pihak yang terpinggirkan.

Hasil kajian ini berkontribusi dalam memperkaya studi sejarah media kolonial dan sejarah perlawanan rakyat di Indonesia, khususnya yang menyoroti peran media dalam konstruksi wacana kekuasaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membandingkan pola pemberitaan ini dengan sumber dari media vernakular atau pribumi yang terbit pada masa yang sama, guna mendapatkan gambaran yang lebih berimbang dan utuh mengenai berbagai sudut pandang yang ada terkait peristiwa Cimarume tahun 1919.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ahmat B. *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*. Studies on Southeast Asia No. 17. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1995.
- Ahmadin, Asep. "Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial." *ATTORIOLOG: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 4, no. 1 (2007): 55-70.
- Algemeen Handelsblad*. 14 Agustus 1919. Amsterdam: P. Den Hengst en Zoon.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983.
- Bataviaasch Nieuwsblad*. 8 Juli 1919; 11 Juli 1919; 15 November 1919. Batavia: Kolff & Co.
- Burger, D. H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Pradnyaparamita, 1962.
- Daliman, Anton. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- De Courant*. 16 Agustus 1919. Amsterdam: NV Dagblad de Telegraaf & NV De Courant.
- De Locomotief*. 22 Juli 1919; 24 Juli 1919; 1 Agustus 1919. Semarang: De Groot, Kolff & Co.
- De Preanger-bode*. 23 Juli 1919. Bandung: J.R. de Vries & Co.
- De Sumatra Post*. 18 Agustus 1919. Padang: J. De Vries & Co.
- De Telegraaf*. 13 Agustus 1919. Amsterdam: Dagblad De Telegraaf.
- Entman, Robert M. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.
- Geertz, Clifford. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Habib, M. "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX." *Jurnal Istoria* 12, no. 2 (2017): 21-32.
- Handayani, Sari A. "Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900-1942." *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (2017): 221-234.
- Hayati, C. *Peristiwa Cimarume Tahun 1919: Perlawanan H. Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi*. Garut: Mimbar Offset, t.th.

- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*. 16 Juli 1919; 19 Agustus 1919; 15 November 1919. Batavia: NV Mij tot Exploitatie van Dagbladen.
- Het Vaderland*. 15 Oktober 1919; 27 November 1919. Den Haag: M. Nijhoff & C.A. van Reyn.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Kutoyo, Suyono. *Haji Hasan Arif: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984.
- Laffan, Michael F. *Sejarah Islam di Nusantara*. Bandung: [t.p.], t.th.
- Luthfiah, W., H. Hannan, dan A. N. K. Syaie. "Dampak Undang-Undang Agraria 1870 terhadap Dinamika Sosial dan Ekonomi Komunitas Arab di Ampel Surabaya, 1870-1930." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 8, no. 3 (2024): 464-477. <https://doi.org/10.29408/fhs.v8i3.28082>.
- Masyrullahushomad, M., dan S. Sudrajat. "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2020): 159-171. <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>.
- Munir, M. "Peran Ulama dalam Gerakan Perlawanan Rakyat di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 13, no. 1 (2019): 45-62.
- Nafi, M. I., dan Badrun. "Perlawanan Ulama dan Petani terhadap Kebijakan Kenaikan Pajak oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Cimarame Garut, 1919." Laporan Penelitian, 2025.
- Nieuwe Rotterdamsche Courant*. 15 November 1919. Rotterdam: N.V. Nederlandsche Dagbladpers.
- Nuraidah, Siti. "Peristiwa Cimarame hingga Pemberontakan Sarekat Rakyat di Garut (1918-1926)." Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023.
- Permana, Asep M. *Banjir Getih di Pasantren Cimarame*. Bandung: Putra Pajajaran Mandiri, 2012.
- Poesponegoro, Marwati D., dan Nugroho Notosusanto, ed. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Said, Edward W. *Orientalism*. New York: Pantheon Books, 1978.
- Schiller, Herbert I. *Culture, Inc.: The Corporate Takeover of Public Expression*. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Setiawan, A. A., dan Y. M. Kusuma. "Propaganda dan Perlawanan: Pers, Kekuasaan Kolonial, dan Perlawanan Pribumi." *LEXSOCIETY: Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2026): 77-94.
- Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sutherland, Heather. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Van Niel, Robert. *Munculnya Elite Birokrasi Modern*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Yuliati. "Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa." *Sejarah dan Budaya* 7, no. 1 (2013): 96-102.

Zulyanti, M., Zuriatin, Z., S. Syahbuddin, dan A. G. Hidayat. “Dampak Kebijakan Agraria Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Pulau Jawa, 1870-1940.” *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 9, no. 2 (2025): 336-349.
<https://doi.org/10.29408/fhs.v9i2.31774>